

EFEKTIVITAS SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP) DALAM MENGHADAPI KESENJANGAN KUALITAS PENDIDIKAN ANTARWILAYAH

Annuri Putri Dupa^{1*}, Santi Novita Sari², Harliawan³, Mohammad Muspawi⁴, Eva Iryani⁵
Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jambi, Indonesia

*Corresponding author email: annuriputridupa@gmail.com

Article History

Received: 26 April 2026

Revised: 22 May 2026

Published: 31 May 2026

ABSTRACT

The quality of education is a key indicator of human resource development and national competitiveness. However, the disparity in education quality between regions remains a significant challenge in Indonesia, influenced by differences in resources, infrastructure, and institutional capacity. The Education Quality Assurance System (SPMP) serves as a strategic instrument to ensure equitable compliance with National Education Standards through internal (SPMI) and external (SPME) mechanisms. This article aims to analyze the effectiveness of SPMP in addressing the disparity in education quality between regions by reviewing aspects of quality culture, leadership, data utilization, and a contextual approach. The study employed a literature review method, reviewing various relevant scientific sources. The results indicate that SPMP has significant potential to improve education quality through a continuous improvement cycle and the use of evidence-based data. However, its implementation still faces challenges such as limited resources, the digital divide, the risk of bureaucratization, and the low internalization of a quality culture. Therefore, strengthening collaboration, increasing human resource capacity, and policy flexibility based on local contexts are needed so that SPMP can function optimally in realizing equitable education quality.

Keywords: Education Quality Assurance System (SPMP), Education Quality, Education Gap Between Regions, Internal Quality Assurance System (SPMI), External Quality Assurance System (SPME).

Copyright © 2026, The Author(s).

How to cite: Dupa, A. P., Sari, S. N., Harliawan, H., Muspawi, M., & Iryani, E. (2026). Efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dalam Menghadapi Kesenjangan Kualitas Pendidikan Antarwilayah. *NUSRA : Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 7(2), 989–994. <https://doi.org/10.55681/nusra.v7i2.6216>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

LATAR BELAKANG

Pendidikan berkualitas merupakan instrumen krusial dalam membentuk masa depan individu sekaligus menjadi fondasi utama kemajuan bangsa di era globalisasi. Menurut Pervaiz (2025), kualitas pendidikan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas institusi serta kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi dinamika global. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda strategis dalam pembangunan nasional.

Namun demikian, tantangan besar yang masih dihadapi adalah adanya kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. Di Indonesia, meskipun akses terhadap pendidikan dasar telah mengalami peningkatan yang signifikan, permasalahan literasi dan numerasi yang masih rendah serta tata kelola pendidikan yang belum optimal menjadi hambatan dalam pemerataan mutu pendidikan. Haryono et al. (2019) menegaskan bahwa perbedaan sumber daya, sarana prasarana, dan kapasitas kelembagaan di berbagai daerah menyebabkan terjadinya disparitas kualitas layanan pendidikan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) sebagai mekanisme sistematis untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. SPMP mencakup dua komponen utama, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, serta Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi dan supervisi oleh lembaga berwenang (Afirda et al., 2025; Widyanti et al., 2025).

Meskipun demikian, implementasi SPMP di berbagai daerah masih menghadapi

tantangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya, kesenjangan akses teknologi, serta rendahnya pemahaman terhadap standar mutu. Selain itu, perbedaan konteks sosial dan geografis juga menuntut adanya pendekatan yang lebih adaptif dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan (Dey & Beri, 2025; Makiya et al., 2023).

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dalam menghadapi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Sejalan dengan hal tersebut, Standar Nasional Pendidikan (SNP) memiliki peran strategis sebagai instrumen utama dalam menjamin mutu dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa SNP tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur kualitas, tetapi juga sebagai strategi untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah melalui penerapan delapan standar nasional yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Implementasi SNP terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, kompetensi pendidik, serta akuntabilitas manajemen sekolah, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan dukungan kebijakan yang belum merata (Dilan, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review* atau studi literatur. Jenis studi literatur yang digunakan adalah studi literatur naratif, yaitu dengan menelaah,

membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai hasil penelitian serta dokumen ilmiah yang berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dan kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional, buku, prosiding, serta dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan topik penelitian. Kriteria sumber yang digunakan meliputi publikasi ilmiah yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir, memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi SPMP, serta memuat pembahasan mengenai mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara daring menggunakan database ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, dan sumber akademik lainnya dengan kata kunci yang berkaitan dengan SPMP, mutu pendidikan, dan kesenjangan pendidikan. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi tema, kredibilitas sumber, dan kesesuaian isi dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, pengelompokan informasi, interpretasi isi, dan penarikan kesimpulan. Tahapan kajian dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan literatur, seleksi sumber, analisis isi literatur, hingga penyusunan sintesis untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas SPMP dalam mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas SPMP dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Secara konseptual, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) memiliki peran

penting dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui siklus perbaikan berkelanjutan. Pervaiz (2025) menekankan bahwa integrasi teknologi dan keterlibatan *stakeholder* dapat meningkatkan efektivitas sistem penjaminan mutu secara signifikan. Dalam konteks Indonesia, SPMP menjadi instrumen strategis untuk mengurangi disparitas kualitas pendidikan antarwilayah, terutama di tengah masih rendahnya literasi, numerasi, dan belum optimalnya tata kelola pendidikan. Namun, efektivitas implementasinya tetap bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan kebijakan di masing-masing daerah.

2. Peran SPMP dalam Mengatasi Kesenjangan Antarwilayah

SPMP dapat membantu mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan data evaluasi secara optimal. Rahminawati et al. (2023) menunjukkan bahwa pemetaan mutu yang akurat dapat menjadi dasar dalam merancang intervensi pendidikan yang lebih tepat sasaran. Di Indonesia, penggunaan data Asesmen Nasional mulai mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya di daerah yang sebelumnya belum terjangkau sistem evaluasi yang komprehensif.

3. Mekanisme Internal: Membangun Budaya Mutu dari Sekolah

Salah satu komponen utama SPMP adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Afiralda et al. (2025) menjelaskan bahwa SPMI berfungsi membangun budaya mutu melalui penerapan siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Melalui mekanisme ini, sekolah melakukan evaluasi diri secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan institusi serta menyesuaikan pelaksanaan

pendidikan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan demikian, SPMP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.

4. Mekanisme Eksternal: Pengawasan dan Standarisasi Objektif

Selain mekanisme internal, SPMP diperkuat melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) berupa akreditasi dan supervisi oleh lembaga berwenang. Widyanti, Sulistyahati, dan Haryati (2025) menegaskan bahwa SPME berfungsi memastikan satuan pendidikan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Evaluasi eksternal juga membantu mengidentifikasi berbagai persoalan mendasar, seperti ketimpangan kualitas tenaga pendidik dan keterbatasan sarana prasarana, yang berdampak langsung pada kualitas pembelajaran.

5. Perspektif Global dalam Menghadapi Kesenjangan

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dey dan Beri (2025) menjelaskan bahwa program *Shaala Siddhi* di India membantu sekolah mengidentifikasi kelemahan dan kebutuhan berdasarkan kondisi wilayah masing-masing. Sementara itu, penelitian Makiya, Mnyanyi, dan Ngirwa (2023) di Tanzania menunjukkan bahwa penerapan standar penjaminan mutu yang tepat berpengaruh signifikan terhadap capaian belajar siswa. Temuan tersebut menegaskan bahwa sistem penjaminan mutu harus berorientasi pada peningkatan proses pembelajaran, bukan sekadar pemenuhan administrasi.

6. Tantangan Implementasi SPMP

Meskipun memiliki konsep yang komprehensif, implementasi SPMP masih

menghadapi berbagai kendala. Haryono et al. (2019) mengidentifikasi beberapa hambatan utama, seperti kurangnya sosialisasi standar pendidikan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, dan keterbatasan pemetaan mutu. Selain itu, kesenjangan akses teknologi di wilayah terpencil juga menjadi tantangan dalam integrasi sistem penjaminan mutu berbasis digital. Kurangnya pemahaman pendidik terhadap standar mutu serta penerapan kebijakan yang belum sepenuhnya menyesuaikan kondisi lokal turut memengaruhi efektivitas SPMP dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara merata.

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas SPMP ke depan memerlukan beberapa langkah strategis, yaitu penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pengembangan profesional guru; serta penerapan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif tanpa mengurangi standar esensial pendidikan.

Dengan penguatan pada mekanisme internal dan objektivitas pada mekanisme eksternal, SPMP diharapkan tidak lagi dipandang sebagai rutinitas birokrasi semata, melainkan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik di Indonesia.

7. Strategi Penguatan SPMP ke Depan

Untuk meningkatkan efektivitas SPMP, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pervaiz (2025) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam memperkuat sistem penjaminan mutu.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan budaya mutu, serta fleksibilitas sistem terhadap konteks lokal menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi SPMP.

8. Analisis Kritis Efektivitas SPMP

SPMP secara konseptual dirancang sebagai sistem yang komprehensif, namun dalam implementasinya masih menunjukkan kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Rahminawati et al. (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu sangat bergantung pada komitmen internal sekolah, sedangkan Haryono et al. (2019) menyoroti lemahnya koordinasi dan pemanfaatan data sebagai hambatan utama.

Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas SPMP tidak hanya ditentukan oleh desain sistem, tetapi juga oleh kesiapan institusi dalam mengimplementasikannya. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara *policy design* dan *policy implementation* yang perlu dijumpati melalui penguatan kapasitas dan supervisi berkelanjutan.

Selain itu, jika dibandingkan dengan praktik internasional, seperti yang diungkapkan oleh Pervaiz (2025), keberhasilan sistem penjaminan mutu sangat dipengaruhi oleh integrasi teknologi dan budaya mutu yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu memperkuat aspek digitalisasi dan internalisasi nilai mutu untuk meningkatkan efektivitas SPMP secara menyeluruh.

9. Implikasi Praktis

Temuan dalam kajian ini memiliki implikasi praktis bagi berbagai pihak. Bagi sekolah, penting untuk memperkuat implementasi SPMP melalui evaluasi diri yang berbasis data dan penguatan budaya mutu, sebagaimana ditekankan oleh

Rahminawati et al. (2023) bahwa pemetaan mutu dan evaluasi internal merupakan kunci peningkatan kualitas pendidikan.

Bagi pemerintah daerah, diperlukan peningkatan koordinasi dan dukungan sumber daya, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur, mengingat variasi kapasitas daerah menjadi faktor utama dalam kesenjangan mutu pendidikan (Haryono et al., 2019).

Sementara itu, pemerintah pusat perlu memastikan integrasi kebijakan penjaminan mutu dengan transformasi digital pendidikan, karena pemanfaatan teknologi terbukti dapat meningkatkan efektivitas sistem penjaminan mutu dan memperluas akses pendidikan berkualitas.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan serta mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. Melalui mekanisme penjaminan mutu internal dan eksternal, SPMP dapat membantu satuan pendidikan melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Pemanfaatan data evaluasi pendidikan juga menjadi faktor penting dalam mendukung perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Namun, implementasi SPMP masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap standar mutu, kesenjangan akses teknologi, dan belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pendidik, pemerataan infrastruktur pendidikan, serta dukungan kebijakan yang adaptif agar

pelaksanaan SPMP dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah. Dengan implementasi yang optimal, SPMP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai strategi berkelanjutan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afirda, R., et al. (2025). Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan di era digital.
- Bisma, A. (2023). Implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan*, 15(2), 123–135.
- Dey, S., & Beri, N. (2025). Quality assurance frameworks in school education: Insights from Shaala Siddhi. *International Journal of Educational Development*, 85, 102–115.
- Dilan, R. (2024). Peran Standar Nasional Pendidikan dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 12(1), 45–60.
- Harvey, L. (2006). Understanding quality culture. *Quality in Higher Education*, 12(1), 3–20.
- Haryono, S., et al. (2019). Sistem penjaminan mutu pendidikan: Konsep dan implementasi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 1–15.
- Hoecht, A. (2006). Quality assurance in UK higher education: Issues of trust, control, professional autonomy and accountability. *Higher Education*, 51(4), 541–563.
- Huusko, M., & Ursin, J. (2010). Why (not) assess? Views from the academic departments. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 35(7), 821–832.
- Jensen, H. T., et al. (2006). Quality culture and organizational change. *European Journal of Education*, 41(2), 157–170.
- Makiya, Z., Mnyanyi, C., & Ngirwa, C. (2023). Quality assurance practices and students' academic performance in secondary schools in Tanzania. *African Educational Research Journal*, 11(3), 210–220.
- Nguyen, H. C. (2018). Quality assurance in higher education: A comparative study. *Quality Assurance in Education*, 26(1), 87–102.
- Pervaiz, K. (2025). The role of quality education in global competitiveness and institutional effectiveness. *Journal of Global Education Studies*, 10(1), 55–70.
- Podgornik, B. B., & Vogrinc, J. (2017). The role of school leadership in self-evaluation processes. *Educational Studies*, 43(2), 205–220.
- Rahminawati, N., & Supriyadi, A. (2023). Implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan budaya mutu sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 10(2), 89–102.
- Rahminawati, N., et al. (2023). Evaluasi diri sekolah sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan berbasis data. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 8(1), 33–47.
- Stensaker, B., et al. (2011). Use, updating and integration of quality assurance systems in higher education. *Quality in Higher Education*, 17(2), 189–204.
- Widyanti, S., Sulistyahati, D., & Haryati, T. (2025). Akreditasi sebagai instrumen penjaminan mutu eksternal pendidikan. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 13(1), 67–80.